

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 20 Juni 2025

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

RESKI BASYAH HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 20 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

dto

PATUAN RAHMAT SYUKUR PARLAUNGAN HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2025
NOMOR 28

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ubj
KEPALA BAGIAN HUKUM


RICKY FANOLY HRP, S.STP

19810228 199912 1 001

peningkatan fasilitas kesehatan, serta sosialisasi tentang rujukan kesehatan yang tepat di tingkat kabupaten/kota.

4. Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kestinambungan Fiskal Daerah.

Fokus pertama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Penguatan Stabilitas Ekonomi dan Kestinambungan Fiskal Daerah berfokus pada industrialisasi dan hilirisasi di Provinsi Sumatera Utara (INDHIRA) untuk memperkuat ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Salah satu inisiatif utama adalah pengembangan Kawasan Industri dan Klaster Bio Industri. Selain itu, ada juga upaya untuk membangun Sentra Teknologi dan Inovasi Industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Kuala Tanjung, guna meningkatkan daya saing industri lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Untuk mendukung industri hilir, program ini juga akan mengembangkan produksi Biodiesel dan hilirisasi kelapa sawit dengan memberikan bantuan teknis dan pembiayaan untuk replanting kelapa sawit di daerah-daerah yang membutuhkan. Dukungan dari pemerintah kabupaten/kota akan mencakup penyediaan lahan dan fasilitas pengembangan industri hilir, serta peningkatan rantai pasok bahan baku industri untuk mendukung perkembangan industri hilir di daerah tersebut.

Fokus kedua Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Penguatan Stabilitas Ekonomi dan Kestinambungan Fiskal Daerah pada Sinergi Ekonomi dan Investasi Sumatera Utara (SEMASTA) melalui pemberian insentif dan kepastian hukum bagi investasi seperti penyederhanaan proses perizinan dan regulasi yang lebih transparan. Pemerintah Provinsi juga akan meningkatkan akses dan fasilitas untuk investasi di kawasan industri khusus (KEK), seperti KEK Sei Mangkei, Kuala Tanjung, dan Kawasan Industri Medan (KIM), serta mendukung pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung investasi di daerah tersebut. Selain itu, promosi potensi daerah dan

kemitraan strategis dengan memperkuat hubungan internasional dan partisipasi dalam berbagai forum investasi serta kerjasama dengan forum investasi internasional dan event Penang Sumatera Utara (PENSTURA). Untuk mendukung keberhasilan program ini, pemerintah kabupaten/kota akan berperan aktif dalam memberikan kemudahan perizinan, menyediakan infrastruktur yang mendukung, dan memastikan bahwa proyek investasi strategis dapat berjalan dengan lancar, sekaligus mempromosikan branding Sumatera Utara sebagai lokasi investasi yang menarik dan menguntungkan.

Fokus ketiga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Penguatan Stabilitas Ekonomi dan Kestinambungan Fiskal Daerah pada Reformasi, Efisiensi, dan Penyusunan Model Bisnis serta Tata Kelola BUMD bertujuan untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sumatera Utara dengan fokus pada efisiensi manajerial dan pengelolaan yang lebih baik. Salah satu strategi utama adalah peningkatan pendapatan dan dividen BUMD melalui revitalisasi dan efisiensi manajemen, yang mencakup perbaikan sarana, prasarana, serta peningkatan pelayanan kepada konsumen dan nasabah. Kemudian pencapaian Initial Public Offering (IPO) Bank Sumut dan penguatan Bank Sumut Syariah. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan PDAM Tirtanadi juga menjadi bagian dari agenda ini, dengan peningkatan kapasitas jaringan distribusi serta penerapan sistem manajemen modern yang efisien dan berkualitas. Terakhir, penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko yang lebih baik di BUMD. Dukungan dari pemerintah kabupaten/kota akan mencakup perbaikan infrastruktur dan penyediaan layanan yang lebih baik, serta kolaborasi dalam pengelolaan UMKM untuk memanfaatkan produk perbankan dari Bank Sumut.

Fokus keempat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Penguatan Stabilitas Ekonomi dan Kestinambungan Fiskal Daerah adalah Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu fokus utama adalah optimalisasi pajak dan retribusi daerah, yang

Sumber : Bapelitbangda Kab. Paluta, 2025

Penyelarasan indikator makro pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara, Nasional dan Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat pada taeb berikut:

Tabel 4.9
Penyelarasan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara, Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No	Indikator	Nasional	Provsu	Kab. Paluta
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,2-5,4	5,00-5,75
2	PDRB per Kapita (juta)	83,2-85,7	78,4-115,3	81,044
3	Kontribusi PDRB Kabupaten / Kota	5,2	5,2-5,3	1,5
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8	7,46-6,96	8,75
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,06-5,59	5,56,5,27	3,8
6	Rasio Gini	0,378-0,382	0.305-0,303	0,24-0,23
7	Indeks Modal Manusia (Indeks Pembangunan Manusia)	0,56	0.53/76,00	75,00
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00-2,77	1	1.00 - 2.77
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Poin)	77,37	77.37	77,64

Sumber : Perubahan RKPD Provsu 2025

Berdasarkan tabel diatas terjadi perubahan target indikator makro pembangunan dari 5 indikator mengalami Perubahan 2 Indikator yaitu Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 4.10